

Penetapan Renja



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR: 1684/050.13/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2022 dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2022 serta berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Makassar tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1540 Tahun 2018);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6629);
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
27. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017);
29. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4).

30. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
31. Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 53) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 73);
32. Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Sctda. Kota Makassar di Makassar;
7. Peringgal.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
 NOMOR:
 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
 PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

No.	Perangkat Daerah
1	2
1.	Dinas Pendidikan Kota Makassar
2.	Dinas Kesehatan Kota Makassar
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar
5.	Dinas Perpustakaan Kota Makassar
6.	Dinas Kearsipan Kota Makassar
7.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
8.	Dinas Kebudayaan Kota Makassar
9.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
10.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
11.	Dinas Pariwisata Kota Makassar
12.	Dinas Sosial Kota Makassar
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
14.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar
15.	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
16.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
17.	Dinas Perhubungan Kota Makassar
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
19.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
20.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
21.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
22.	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
23.	Dinas Perdagangan Kota Makassar
24.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
25.	Dinas Pertanahan Kota Makassar
26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar
27.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar
28.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
29.	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
30.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kota Makassar
31.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar
32.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
33.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar

34.	Inspektorat Daerah Kota Makassar
35.	Sekretariat DPRD Kota Makassar
36.	Sekretariat Daerah Kota Makassar
37.	Kecamatan Makassar Kota Makassar
38.	Kecamatan Tamalate Kota Makassar
39.	Kecamatan Manggala Kota Makassar
40.	Kecamatan Rappocini Kota Makassar
41.	Kecamatan Mariso Kota Makassar
42.	Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
43.	Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
44.	Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar
45.	Kecamatan Wajo Kota Makassar
46.	Kecamatan Tallo Kota Makassar
47.	Kecamatan Bontoala Kota Makassar
48.	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
49.	Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
50.	Kecamatan Mamajang Kota Makassar
51.	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar

WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	4
BAB I	6
PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2. LANDASAN HUKUM	9
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	12
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	13
BAB II	16
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN LALU	16
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan	16
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	51
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	56
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	93
BAB III	97
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	97
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	97
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Makassar	99
3.3. Program dan Kegiatan	101
BAB IV	104
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	104
BAB V	143
PENUTUP.....	143

KATA PENGANTAR

Assalamu álaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunia, rahmat dan kemudahan yang diberikan oleh-Nya. Rencana Kerja Perangkat daerah (RENJA-SKPD) Merupakan dasar perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun kedepan dan merupakan penjabaran dari RPJMD. Penyusunan Rencana Kerja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturannya secara rinci mengacu pada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Satuan Perangkat daerah (RENJA-SKPD) ini kiranya dapat menjadi pedoman dalam Melaksanakan Program dan Kegiatan pada Dinas Perdagangan tahun 2022 dimana Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah merupakan dasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan atas semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana kerja tahunan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukannya dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja kedepan.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Dinas Perdagangan Kota Makassar mampu melaksanakan tugas dan pengabdian

dengan sebaik-baiknya tanpa kendala serta mampu meningkatkan prestasi kerja
ke depan Amin Yaa Rabbal Alamin.

Makassar, November 2021
Plt. Kepala Dinas Perdagangan
Kota Makassar

ARLIN ARIESTA S.STP,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19770411 199511 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 351 ayat (2) yang menyebutkan “Berdasarkan rancangan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah’.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) merupakan dokumen satuan kerja perangkat daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Fungsi Renja – SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah kerjanya.

Renja – SKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sekaligus membuat hasil evaluasi Renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta membuat program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah 1 (satu) tahun kedepan. Pembuatan dokumen Renja – SKPD, Dilaksanakan untuk mengukur kinerjanya sejauh mana capaian kinerja yang dapat di realisasikan oleh SKPD tersebut.

Penyusunan Renja – SKPD Tahun 2022 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan melakukan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, yang meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, menganalisa kinerja pelayanan dinas yang sudah dilaksanakan, mereview kembali rancangan awal Renja kerja perangkat daerah (RKPD), penelaahan kembali usulan – usulan

program dan kegiatan hasil musrembang dari masyarakat serta penelahaan kebijakan – kebijakan strategis dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja – SKPD utamanya Dinas Perdagangan Kota Makassar merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah daerah terendah dan terkecil . Renja SKPD sangat berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Apalagi di tengah kondisi pandemic Covid-19 sekarang ini dimana seluruh sektor kehidupan menjadi lumpuh, maka dalam menyikapi hal ini peran Dinas Perdagangan khususnya di Kota Makassar untuk melaksanakan kegiatan yang difokuskan untuk pemulihan Ekonomi Pasca Covid.

Kualitas penyusun Renja – SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan kepada masyarakat karena itu dalam penyusunan Renja – SKPD Tahun 2022 membutuhkan sikap kehatian – hatian .

Prinsip-prinsip yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar dalam menyusun Rencan Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan tentang program-program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan;
2. Rumusan program dan kegiatan di dalam penyusunan RENJA-SKPD didasarkan pada pertimbangan pada urusan-urusan pelayanan wajib atau pilihan pemerintah daerah yang memerlukan skala prioritas pelayanan dan mempertimbangkan pagu indikatif;
3. Penyusunan Renja-SKPD dilakukan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran dan alokasi sumber daya yang ada pada APBD Kota, APBD Provinsi, dan APBN serta sumberstandarsumber dana yang lainnya;

5. Penyusunan dokumen RENJA-SKPD merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan APBD;
6. Program-program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen Renja-SKPD dirinci menurut sumber dana yang ada pada APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN serta sumber standar sumber pendanaan yang lainnya;
7. Program-program dan kegiatan yang termuat di dalam dokumen RENJA-SKPD memuat tolak ukur, target, capaian kinerja, keluaran, biaya satuan perkeluaran dan total kebutuhan anggaran;
8. Menjadikan dokumen RENJA-SKPD sebagai pedoman dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut di atas, maka Dinas Perdagangan Kota Makassar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerjanya berpedoman dan mengacu pada rancangan awal RKPD Kota Makassar Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005);
8. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia 45 Tahun 2014, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462)

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dsan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
22. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
24. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
26. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 38);
27. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8 ;
28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar 2005-2025;

29. Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penetapan RKPD Kota Makassar tahun 2021;
30. Surat Keputusan bersama Menteri Keuangan Nomor 177/KMK/07/2020, Menteri Dalam Negeri nomor 119/2813/SJ tanggal 09 April 2020 tentang Percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
31. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/6802/Bangda tanggal 16 Desember 2019 perihal Penyusunan RKPD Tahun 2021 Kota Makassar.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2022 dimaksudkan untuk:

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan pembangunan Kota Makassar yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perdagangan Kota Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2022.
2. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta berkelanjutan dan berkeadilan.
3. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antara sekretariat dan bidang-bidang yang ada pada Dinas Perdagangan Kota Makassar.
4. Sebagai bahan penilaian kinerja tahunan bagi aparatur sipil negara yang ada pada lingkup Dinas Perdagangan.

1.3.2. Tujuan :

1. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi di masing-masing bidang, seksi dan kasubag Dinas Perdagangan Kota Makassar;
2. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi di masing-masing bidang, seksi dan kasubag Dinas Perdagangan Kota Makassar;

3. Penyeragaman program dan kegiatan dalam mengoptimalkan pencapaian sasaran sesuai visi dan misi serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Makassar;
4. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas pagu indikatif Dinas Perdagangan Kota Makassar.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan Kota Makassar disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang renja Dinas Perdagangan Kota Makassar, proses penyusunan Renja PD, Keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Dinas Perdagangan Kota Makassar serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD

tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RenjaSKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikatorkinerjayangsudahditentukan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan tentang sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebutdilakukan, Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Berisikan uraian hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Pemerintah Daerah Kota Makassar, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kota.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kerja Renstra perangkat daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai : Faktor-factor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap bahan rumusan program dan kegiatan; Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya; Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup, berupa :

- a.catatan penting yang perlu mendapat perhatian;
- b.kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
- c.rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

Selama Tahun 2020, Dinas Perdagangan Kota Makassar telah melaksanakan 11 (sebelas) program dan 74 (tujuh puluh empat) kegiatan, terdiri dari 4 (empat) program penunjang/pendukung dengan 32 (tiga puluh dua) kegiatan dan 7 (tujuh) program utama dengan 42 (empat puluh dua) kegiatan. Realisasi capaian target kinerja tahun 2020, 7 (tujuh) program utama jika dibandingkan dengan target Renstra adalah sebagai berikut:

a. Program peningkatan usaha dan sarana perdagangan..... 0 %

Pada Program ini terdapat lima indikator kinerja yaitu :

1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Pada indikator ini Dinas Perdagangan Kota Makassar menargetkan PDRB sektor perdagangan sebesar Rp. 31.391.560.000, adapun realisasi sebesar Rp. 23.777.629.400. Dan capaian kinerja adalah 75,74 %. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

$$(x = \frac{\text{Nilai perdagangan yang di targetkan}}{\text{Nilai perdagangan dalam negeri}} \times 100\%)$$

$$(x = \frac{23.777.629.400}{31.391.560.000} \times 100\%) = 75,74 \%$$

2. Peningkatan usaha perdagangan

Pada indikator ini target peningkatan usaha perdagangan sebesar 9 %, pada indikator ini capaian kinerjanya adalah 0 %, karena pada program ini kegiatan yang menunjang anggarannya mengalami refocusing dalam rangka penanganan Covid-19.

3. Peningkatan nilai perdagangan daerah.

Pada indikator ini target kinerja yang ingin di capai adalah Rp. 9.750.314.285.000 adapun realisasi -7.976.231.650.000 dengan capaian kinerja -81,80 %.

4. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Pada indikator ini target kinerjanya adalah sebesar 87,36 % namun karena kondisi COVID-19 kegiatan yang menunjang kinerja ini tidak bisa dilaksanakan karena anggarannya di refocusing dalam rangka penanganan covid-19

5. Jumlah Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (SNI)

Pada indikator ini yang menjadi target kinerja adalah 1 pasar Rakyat yang ber SNI namun realisasinya masih 0 ,

2. Jumlah produk ekspor unggulan

Pada indikator ini realisasi adalah seratus persen dari 5 jenis produk ekspor unggulan tidak ada realisasi atau 0 % karena pada target ini tidak ada kegiatan yang mendukung untuk pencapaian target kinerja ini.

Adapun kegiatan yang mendukung pada Program ini adalah:

- a. Pembangunan/Revitalisasi pasar rakyat dengan anggaran Rp. 2.455.850.000
- b. Temu usaha perdagangan/fasilitasi usaha perdagangan dengan anggaran Rp. 0
- c. Operasi Pasar dengan anggaran Rp. 3.210.161.500

Jika dibandingkan dengan capaian target kinerja sasaran sebesar 0 %, maka atas penggunaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di atas sebesar 0.77 % atau sebesar Rp. 43.725.000 dari anggaran sebesar Rp. 5.409.751.000 dapat disimpulkan kurang efisien.

b. Program pelayanan dan pengendalian kemetrolgian 0 %

Cakupan pelayanan kemetrolgian sebesar 58 % dari 1500 alat UTTP yang terdata adapun realisasi pada indikator ini sebesar 41,67 % yaitu dari 1500 alat UTTP yang ada baru 625 UTTP alat yang terlayani. Dengan Capaian kinerja sebesar 71,84 %

Volume

$$(x = \frac{\text{jumlah alat UTPP yang di tera}}{\text{Total alat UTPP}} \times 100\%)$$

$$(x = \frac{625}{1500} \times 100\%) = 41.67\%$$

Capaian

$$(x = \frac{\text{persentase alat yang di tera}}{\text{target capaian kinerja}} \times x)$$

$$(x = \frac{41,67\%}{58\%} \times x) = 71.84\%$$

Cakupan penyelesaian sengketa konsumen sebesar 100 %

Pada indikator ini realisasi kinerja sebesar 100 % yaitu dari target 50 sengketa konsumen yang di tangani adalah 50 kasus. Sedangkan capain kinerja pada indikator ini adalah 100 %.

Volume

$$(x = \frac{\text{jumlah kasus sengketa konsumen}}{\text{Target Jumlah sengketa konsumen}} \times 100\%)$$

$$(x = \frac{50}{50} \times 100\%) = 100.0\%$$

Capaian

$$(x = \frac{\text{persentase kasus sengketa konsumen yang di fasilitasi}}{\text{target capaian kinerja}} \times x)$$

$$(x = \frac{100\%}{100\%} \times x) = 100.100\%$$

Rata-rata Capaian program

$$(x = \frac{71,84\% + 100\%}{2})$$

$$(x = \frac{171,84\%}{2} = 85.92\%$$

Pada Program pelayanan dan pengendalian kemetrollogian rata-rata capaian target kinerja sasaran sebesar 61.29 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0 atau 0 %,yang terdiri dari 1 Kegiatan yang mendukung yaitu Pelyanan Tera/Tera Ulang kantor, tentu akan menjadi pertanyaan kenapa realisasi keuangan 0 % realisasi fisknya mencapai 85,92 % hal ini disebabkan untuk pelyanan tera-tera ulang terdapat biaya kalibrasi

sebesar Rp. 5.000.000 yang anggarannya berada pada Program Rutin pada Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kantor, sedangkan untuk Penyelesaian sengketa Konsumen Menggunakan APBD Tk. I. Maka atas penggunaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di atas sebesar 0.% dapat disimpulkan cukup efisien. Pada indikator cakupan kasus sengketa konsumen yang di fasilitasi menggunakan anggaran Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan karena kewenangan Penyelesaian sengketa konsumen berada di Provinsi tapi karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum mempunyai Tempat Persidangan BPSK maka anggaran kegiatan berada pada Provinsi tapi pelaksanaannya di laksanakan di Dinas Perdagangan Kota Makassar.

c. Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian

Capaian kinerja pada program ini adalah 0 % karena tidak ada kegiatan yang dilaksanakan disebabkan anggaran pada program ini di refocusing untuk kegiatan penanganan Covid-19.

d. Program pengembangan dan pembinaan perindustrian

NO	JENIS BELANJA RINCIAN RUPIAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	prosentase
	Program : Program pengembangan dan pembinaan perindustrian	1.496.209.125,00	984.492.348,00	65,80%
1	Kegiatan : Pameran/promosi industri kecil dan menengah	646.345.000,00	229.830.316,00	35,56%
2	Kegiatan : Pelatihan Peningkatan Kemampuan Pengrajin Daerah	366.139.125,00	284.456.300,00	77,69%
3	Kegiatan : Pengembangan UPTD penyamakan kulit	483.725.000,00	470.205.732,00	97,21%

Dari Tabel di atas Realisasi pada Program pembinaan perindustrian adalah Sebesar Rp. 984.492.348 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.496.209.125 atau sebesar 65,80 % adapun Program ini di dukung oleh 3 Kegiatan yaitu Pameran/promosi industri kecil dan menengah, Pelatihan Peningkatan Kemampuan Pengrajin Daerah dan Pengembangan UPTD penyamakan kulit.

Pada Program ini terdapat 8 indikator yang menjadi target kinerja yaitu

- Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB
Untuk capaian pada indikator ini adalah 18,00 %* dari target 12 % kontribusi Perindustrian terhadap PDRB jadi tingkat capaiannya adalah 150 %*.
- Persentase peningkatan omset Industri Kecil binaan
Untuk capaian kinerja pada indicator ini adalah 0 % disebabkan anggaran untuk kegiatan yang menunjang indikator ini yaitu monitoring usaha industri kecil dan menengah Kota Makassar tidak ada atau tidak dilaksanakan.
- Persentase peningkatan omset Industri Menengah
Untuk capaian pada indikator kegiatan ini juga 0 % atau tidak mencapai target disebabkan tidak ada anggaran pada kegiatan yang mendukung capaian kinerja idikator tersebut.
- Cakupan bina kelompok pengrajin
Untuk capaian kinerja pada indikator ini yaitu sebesar 28,57 % yaitu dari target 700 kelompok yang di bina realisasi hanya 200 kelompok.
- Jumlah Industri kecil berbasis teknologi
Untuk capaian kinerja pada indikator ini adalah 156 % dimana yang menjadi target pada indikator ini adalah 50 IKM yang berbasis teknologi ternyata berdasarkan hasil binaan kami terdapat 78 IKM yang sudah berbasis teknologi.
- Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur
Untuk capaian pada indikator ini adalah -49,65 % dari target 8,5 % realisasi -4,22 %.

- Proporsi tenagakerja pada sektor industri manufactur
Untuk indicator ini tidak dilaksanakan karena kegiatan monitoring industri tidak dilaksanakan.
- Proporsi nilai tambah industri manufactur terhadap PDRB dan Perkapita
Untuk capaian pada indikator ini adalah 64 % dari target 9 % realisasi sebesar 5,8 %.
Jika dibandingkan dengan capaian target kinerja sasaran sebesar 23,071 %, maka atas penggunaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan diatas sebesar 65,80%

e. Program Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.513.196.297,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.716.489.750,00 atau 88,16 %

f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian kinerja Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah 90% dari target 90% yang termuat dalam penetapan kinerja tahun 2020 atau 100% (kategori **Sangat Tinggi**). Capaian kinerja ini sama dengan capaian kinerja Tahun 2019. Hal tersebut terukur dari jumlah peralatan kerja yang berfungsi dengan baik dibandingkan dengan jumlah peralatan kerja di Daftar Inventaris. Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dilaksanakan melalui program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 599.478.974,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 641.608.625,00 atau 93.43%,

2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Triwulan I

Selama Tahun 2021, Dinas Perdagangan Kota Makassar akan melaksanakan 6 (Enam) program dengan 64 (Enam puluh Empat) kegiatan, yang terdiri dari 2 (Dua) program penunjang/pendukung dengan 25 (Dua puluh Lima) kegiatan dan ada 4 (Empat) program utama dengan 36 (Tiga puluh Enam) kegiatan.

Realisasi capaian kinerja Tahun 2021 Dinas Perdagangan Kota Makassar sampai dengan bulan Maret Tahun 2021.

a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja dari program ini adalah:

- Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah. Pada indikator ini realisasi capaian kinerja dari target baru terealisasi 15 % dari target kinerja untuk tahun 2021 sebesar 100 % dengan tingkat capaian 15 %.
- Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaiaan, Perlengkapan, dan Keuangan) untuk indikator ini capaian kinerja masih 0 % dari target 90 %.
- Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas, untuk indikator ini capaian kinerja masih 0 % dari target 90 %.
- Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik, untuk indikator ini capaian kinerja masih 0 % dari target kinerja 90 %.

Adapun untuk realisasi keuangan untuk Program ini sebesar Rp. 2.060.661.650 dari Anggaran Rp. 13.089.609.689, atau sebesar 15,74 % di mana realisasi pada program ini berupa pembayaran gaji dan tunjangan serta langgana listrik dan air dan kebersihan kantor.

Faktor Penghambat :

Penyesuaian terhadap nomenklatur baru dimana Struktur organisasi pada Dinas Perdagangan menyesuaikan dengan program kegiatan sesuai Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan Permendag nomor 96 Tahun 2017 dan Permenperin Nomor 17 Tahun 2018. Kelengkapan organisasi yang belum lengkap.

Program Utama

b. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Indikator pada program ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Pendaftaran Perusahaan dengan target kinerja sebesar 100 %, Adapun realisasi kinerja apad indikator ini masih 0 %. Adapun realisasi Anggaran untuk Tri Wulan I pada Program adalah sebesar Rp. 52.500.000,- dari anggaran sebesar Rp. Rp. 461.986.600 atau sebesar 11,36 %. Adapun Faktor penghambat pada Program ini adalah : Penyesuaian terhadap nomenklatur baru dimana Struktur organisasi pada Dinas Perdagangan menyesuaikan dengan program kegiatan sesuai Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan Permendag nomor 96 Tahun 2017 dan Permenperin Nomor 17 Tahun 2018. Dan belum dikukuhkan nya pejabat sesuai nomenklatur.

c. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Kondisi Baik dengan target capaian 8,3 % untuk realisasi pada indikator program ini mash 0 % karena masih dalam tahap penyusunan kelengkapan admistrasi untuk penimbunan lahan, adapun realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp. 0 dari anggaran sebesar Rp. 1.883.725.186.

d. IV. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase Barang Penting dengan Harga Stabil dengan target kinerja sebesar 80 % dari 11 jenis barang penting. Adapun capaian pada indikator program ini sampai tri Wulan I adalah Baru 20 % selama tri wulan I di lakukan pemantauan.

Adapun realisasi keuangan pada Program ini sebesar Rp. 0,- dari Anggaran sebesar Rp. 243.560.000.

Faktor penghanbat dari program ini adalah untuk kegiatan pemantauan yang berisi pasar murah bersubidi belum bisa dilaksanakan karena ada beberapa komponen barang yang mengalami perubahan harga atau kenaikan melebihi harga yang terdapat pada DPA kegiatan tersebut.

e. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Indikator kinerja dari program ini adalah Ekspor Bersih Perdagangan dengan target kinerja – \$ 600.000.000 US Dollar. Adapun capaian pada indikator program ini sampai tri Wulan I adalah 0 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.500.000 dari anggaran Sebesar Rp. 347.461.200,- atau 3,89 %. Adapun Faktor penghambat dari pelaksanaan Program ini adalah Penyesuaian terhadap nomenklatur baru dimana Struktur organisasi pada Dinas Perdagangan menyesuaikan dengan program kegiatan sesuai Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan Permendag nomor 96 Tahun 2017 dan Permenperin Nomor 17 Tahun 2018. Kelengkapan organisasi yang belum lengkap.

f. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Indikator kinerja dari program ini adalah Cakupan Pelayanan Kemetrolagian dengan target 75 dari 1500 alat UTTP yang ada di kota Makassar. Adapun capaian pada indikator program ini sampai tri Wulan I adalah 5,7 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.709.545 dari anggaran Sebesar Rp. 228.390.800,- atau 9,94 %. Adapun Faktor penghambat dari pelaksanaan Program ini adalah :

Belum disahkannya Ranperda Jasa Umum yang Masih dalam tahap pembahasan di DPRD Kota Makassar. Kurangnya SDM Penera di karenakan beberapa Orang Sudah Pensiun.

g. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Indikator pada program ini adalah Cakupan Bina Kelompok Usaha Informal dengan target indikator sebesar 27 %. Adapun capaian pada indikator program ini sampai tri Wulan I adalah 0 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0 dari anggaran Sebesar Rp. 92.674.000,- atau 0 %. Pada Program ini kegiatan baru dilaksanakan sekitar Bulan Juni ke Atas karena menunggu undangan Pameran Tk. Provinsi Sulawesi Selatan.

h. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Indikator kinerja dari program ini adalah Cakupan Bina Kelompok Industri Kecil Menengah dengan target kinerja 70 %. Adapun capaian pada indikator program ini sampai tri Wulan I adalah 2,0 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.522.758,- dari anggaran Sebesar Rp. 2.028.837.725,- atau 1,26 %. Yang baru berjalan pada program ini adalah kegiatan rutin, penyamaan kulit, sedangkan untuk pelatihan dan pembinaan baru dilaksanakan pada Bulan April tahun 2021.

i. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

Indikator kinerja dari program ini adalah Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kota Makassar sebesar 18,5 %. Adapun capaian pada indikator program ini sampai tri Wulan I adalah 0 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari anggaran Sebesar Rp. 241.772.800,- atau 0 %. Adapun faktor penghambat pada program ini adalah Data PDRB harus menunggu hasil Pengolahan data PDRB Kota Makassar dari BPS Kota Makassar.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan pada Dinas Perdagangan Kota Makassar adalah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan

Pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa harus dilakukan. Untuk menyikapi hal ini maka terdapat 2 (dua) pelayanan yang ada pada Dinas Perdagangan Kota Makassar, yaitu :

1. Pelayanan Internal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat (bersifat administratif) kepada seluruh unit-unit atau pegawai yang berada dalam lingkungan internal organisasi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pelayanan Eksternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan unit-unit lini organisasi (Bidang Teknis dan UPT) bersifat sangat rinci dan teknis yang langsung ditujukan kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah lainnya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun pelayanan yang terdapat pada Dinas Perdagangan kota Makassar dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Pelayanan Bidang Usaha Perdagangan

Menyusun, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan:

1. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pendaftaran perusahaan, pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, sarana dan prasarana perdagangan;
2. Menyusun bahan perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan pengawasan di bidang perdagangan;
3. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin-izin usaha perdagangan;
4. Menyiapkan bahan rencana dan program pembinaan terhadap pendaftaran perusahaan;

2) Menyiapkan bahan bimbingan dan penyelenggaraan wajib Daftar Perusahaan (WDP).

Pelayanan Bidang Standardisasi dan perlindungan konsumen

Melaksanakan pembinaan perlindungan konsumen dan kemetrolagian serta peredaran barang/jasa :

1. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, kemetrolagian legal dan perlindungan konsumen;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, kemetrolagian legal dan perlindungan konsumen;
3. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, kemetrolagian legal dan perlindungan konsumen;
4. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, kemetrolagian legal dan perlindungan konsumen;

3) Pelayanan Bidang Pendataan, Pengendalian Usaha dan Pengembangan Ekspor dan Im por

Melaksanakan pengkajian, pengawasan dan penindakan pelanggaran perdagangan dan perindustrian :

1. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi ekspor impor, bina pelaku ekspor dan pengembangan ekspor;
2. Melaksanaka bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi ekspor impor, bina pelaku ekspor dan pengembangan ekspor;
3. melaksanakan identifikasi produk unggulan kualitas eksport laik promosi dan kerjasama;

4) Pelayanan Bidang Perindustrian

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha industri;

1. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pengawasan usaha dibidang industri;

2. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin usaha industri serta bimbingan produksi;
3. Melakukan pembinaan dan pengembangan sarana dan usaha industri serta bimbingan produksi;
4. Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan dan pengawasan mutu hasil produksi, penerapan standar industri, diversifikasi dan inovasi produk;
5. Melaksanakan promosi dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan teknologi industri;
6. Melaksanakan kemitraan, industri kecil, menengah dan besar dengan sektor ekonomi lainnya;
7. Melaksanakan bimbingan teknis pemantauan penanggulangan pencemaran;
8. Menyusun bahan peningkatan kapasitas IPTEK dan sistem produksi;
9. Menyusun bahan program penataan struktur industri;

Pelayanan Peningkatan teknologi produksi dan pemasaran meliputi peningkatan teknologi produksi dan pemasaran bidang industri tekstil, industri meubel, industri makanan dan minuman, industri kerajinan, industri rumah tangga tersebar di wilayah kota Makassar.

Terkait masalah kinerja pelayanan pada Dinas Perdagangan Kota Makassar senantiasa menunjukkan presentasi yang menggembirakan. Ini tentunya karena pegawai di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Makassar sangat mengerti dan memahami akan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan kepadanya. Disamping itu pula partisipasi masyarakat juga sangat menentukan kesuksesan akan sebuah lembaga.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan review pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Kota Makassar lima tahun terakhir dan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perdagangan Kota Makassar sebagaimana tersebut dalam lampiran daftar tabel 2.2. dan 2.3

Tabel. 2.1

Evaluasi terhadap hasil renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Makassar
Renja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kota Makassar
Periode Pelaksanaan : s/d Maret 2021

Indikator dan target kinerja daerah kabupaten/ Kota yang mengacu pada sasaran RKPD : Dinas Perdagangan

Program / Kegiatan/Su bkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra pada akhir tahun 2020 s/d 2021 (Akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021(%)		Unit Peran gkat Daerah h Penan ggung Jawa b
								I	II	III	IV													
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		.		15
		Satu an	K	R p .	K	R p .	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERDAGANGA N						16,347,389,475	2,126,661,650									2,126,661,650		13.01		2,126,661,650		13		DISDA G

PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Pendaftaran Perusahaan	%				100	461,968,600	0.0	52,500,000	-	-	-	-	52,500,000	-	11.36	-	52,500,000	-	11	DISDA G
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah usaha yang diawasi dan dikendalikan	Unit				340	38,322,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDA G
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah izin usaha yang di fasilitasi	unit				340	38,322,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDA G
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah gudang yang diawasi dan dikendalikan	Usaha				440	165,304,800	-	9,000,000	-	-	-	-	9,000,000	-	5.44	-	9,000,000	-	5	DISDA G

Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah gudang yang di fasilitasi dan diawasi	Usaha				440	165,304,800	-	9,000,000	-	-	-	-	9,000,000	-	5,44	-	9,000,000	-	5	DISDA G
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Usaha Waralaba yang diawasi dan dikendalikan	Usaha				460	140,513,800	-	7,500,000	-	-	-	-	7,500,000	-	5.34	-	7,500,000	-	5	DISDA G
Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasinya izin Waralaba	Usaha				460	140,513,800	-	7,500,000	-	-	-	-	7,500,000	-	5,34	-	7,500,000	-	5	DISDA G
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah usaha minuman beralkohol yang diawasi dan dikendalikan	Unit Usaha				110	117,828,000	-	36,000,000	-	-	-	-	36,000,000	-	30.55	-	36,000,000	-	31	DISDA G
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Izin Usaha Minol yang terbit	Unit Usaha				110	117,828,000	-	9,000,000	-	-	-	-	9,000,000	-	7.64	-	9,000,000	-	8	DISDA G

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Kondisi Baik	%				8.3	1,883,725,186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDA G
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya pasar rakyat yang berstandar Nasional	Pasar				1	1,883,725,186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDA G
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi berstandar SNI	Pasar				1	1,883,725,186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDA G
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Barang Penting dengan Harga Stabil	%				80	243,560,000	20.0	-	-	-	-	20	-	25.00	-	20	-	-	-	-	DISDA G
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pasar yang diintervensi	Pasar				10	243,560,000	3.0	-	-	-	-	3	-	30.00	-	3	-	30	-	-	DISDA G

Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	terkendalinya harga bahan kebutuhan pokok di pasar	Pasar				10	243,560,000	3.0	-	-	-	-	-	3	-	30.00	-	3	-	30	-	DISDA G
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor Bersih Perdagangan	US\$				\$ - 600,000,000	347,461,200	-	13,500,000	-	-	-	-	-	13,500,000	-	3.89	-	13,500,000	-	4	DISDA G
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Kota Makassar yang diselenggarakan	Usaha				60	347,461,200	-	13,500,000	-	-	-	-	-	13,500,000	-	3.89	-	13,500,000	-	4	DISDA G
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha produk ekspor Unggulan Kabupaten /Kota yang dibina dan dikembangkan	Usaha				60	45,859,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDA G

Pameran Dagang Nasional	Jumlah pameran dagang Nasional yang dilaksanakan	Pameran				1	115,963,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDA G
Pameran Dagang Lokal									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0! #DIV/0!
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pameran dagang lokal yang dilaksanakan	Pameran				1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0! #DIV/0!
Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah citra produk ekspor yang ditingkatkan	Produk				25	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0! #DIV/0!
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	Usaha				20	185,639,200	-	13,500,000	-	-	-	-	13,500,000	-	7.27	-	13,500,000	-	7	-	DISDA G
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Pelayanan Kemetrologian	%				75	228,390,800	5.7	22,709,545	-	-	-	-	5.7	22,709,545	7.56	9.94	6	22,709,545	-	10	DISDA G
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terkalibrasinya alat-alat ukur yang digunakan oleh pelaku usaha	UTTP				1500	228,390,800	85.0	22,709,545	-	-	-	-	85	22,709,545	5.67	9.94	85	22,709,545	6	10	DISDA G

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat UTTP yang dilayani dikantor	UTTP				1500	85.0	-					85	5.67	85	6		DISDA G
	Jumlah alat UTTP yang dilayani di tempat pelaku usaha	UTTP				1500	145,284,600	16,709,545	-	-	-	-	16,709,545	11.50	16,709,545	12		DISDA G
Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah alat UTTP yang dikalibrasi	UTTP				1500	83,106,200	500.0	6,000,000	-	-	-	6,000,000	7.22	6,000,000	7		DISDA G
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Bina Kelompok Usaha Informal	%				27	92,674,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDA G
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Produk usaha informal yang di promosikan	Usaha				4	92,674,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDA G
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pameran Promosi Perdagangan	Pameran				1	92,674,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDA G
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERINDUSTRIAN							2,270,610,525	25,522,758	-	-	-	25,522,758	1.12	25,522,758	#DIV/0!		DISDA G	

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok Industri Kecil Menengah	%				70	2,028,837,725	2.0	25,522,758	-	-	-	-	2	25,522,758	2.86	1.26	2	25,522,758	-	1	DISDA G
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya nilai produksi IKM yang mendapatkan Binaan	IKM				350	2,028,837,725	-	25,522,758	-	-	-	-	-	25,522,758	-	1.26	-	25,522,758	-	1	DISDA G
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Musyawarah Nasional yang diikuti	Pameran				1	546,887,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDA G
	Jumlah pameran Dekranasda yang diikuti	Pameran				3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pameran industri kecil/menengah yang diikuti	Pameran				2	290,559,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDA G
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pengrajin perak yang di bina	Usaha				10	643,351,725	-	25,522,758	-	-	-	-	-	25,522,758	-	3.97	-	25,522,758	-	4	DISDA G
	Waktu operasional IPTD	Bulan				12		3.0	-	-	-	3	25.00	3	25	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan	Jumlah Perajin Daerah yang mengikuti pelatihan	Orang				200	548,040,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Peran Serta Masyarakat	peningkatan																				
	Jumlah Perajin Home Industri yang dibina	Orang			150		-		-					-		-		-			
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kota Makassar	%			18.5	241,772,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDA G
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	terfasilitasinya perizinan bagi Usaha industri kecil dan menengah	Usaha			100	241,772,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDA G
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data IKM	IKM			360	241,772,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDA G

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENT ASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	%			100	15.0	-				15	15.00	15	15	DISDA G		
	Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan, dan Keuangan)	%		90	13,089,609,689	-	2,060,661,650	-	-	-	-	2,060,661,650	15.74	-	2,060,661,650	16	DISDA G
	PERSENT ASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT Peningkatan Kapasitas	%		90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDA G	

	PERSENT ASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	%				90	-	-															DISDA G
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Dokumen				7	42,159,000	1.0	-	-	-	-	-	1	-	14.29	-	1	-	14	-		DISDA G
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen				2	25,570,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DISDA G
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA SKPD	Dokumen				2	2,730,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DISDA G
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan RKA Perubahan	Dokumen				1	3,444,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DISDA G

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA SKPD	Dokumen				1	1,425,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDA G
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA pokok	Dokumen				1	2,119,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDA G
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen pelaporan	Dokumen				3	4,281,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDA G
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi kinerja SKPD	Dokumen				1	2,590,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDA G
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan PNS	Bulan				12	11,878,399,039	3.0	1,949,624,996	-	-	-	-	3	1,949,624,996	25.00	16.41	3	1,949,624,996	25	16	DISDA G
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	Bulan				12	11,641,699,039	3.0	1,893,104,996	-	-	-	-	3	1,893,104,996	25.00	16.26	3	1,893,104,996	25	16	DISDA G
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengelolaan administrasi keuangan	Bulan				12	236,700,000	3.0	56,520,000	-	-	-	-	3	56,520,000	25.00	23.88	3	56,520,000	25	24	DISDA G

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersedianya laporan semesteran, Laporan akhir tahun, laporan Bulanan	Dokumen				15	0	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	DISDA G
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pasang				121	84,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDA G
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pasang				121	84,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDA G
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan bimbingan yang diikuti	diklat				10	0	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	DISDA G
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	%				100	257,598,000	15.0	680,000	-	-	-	15	680,000	15.00	0.26	15	680,000	15	0	DISDA G

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Jenis				8	4,578,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDA G	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan komputer, laptop, scanner dan printer	Jenis				4	133,814,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDA G	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pengadaan alat rumah tangga						0	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		DISDA G	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedia barang cetakan dan penggandaan	Bulan				12	5,206,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDA G	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	Jenis				7	24,000,000	-	680,000	-	-	-	-	-	680,000	-	2.83	-	680,000	-	3	DISDA G
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	kali				9	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDA G	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	%				100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	DISDA G	
Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meja dan kursi kerja	unit				5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	DISDA G	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	%				100	376,031,100	3.0	53,587,004	-	-	-	-	3	53,587,004	3.00	14.25	3	53,587,004	3	14	DISDA G
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa persuratan yang di laksanakan	bula n				12	141,981,600	3.0	10,500,000	-	-	-	-	3	10,500,000	25.00	7.40	3	10,500,000	25	7	DISDA G
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bula n				12	145,883,000	3.0	25,837,004	-	-	-	-	3	25,837,004	25.00	17.71	3	25,837,004	25	18	DISDA G
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan keamanan kantor	Bula n				12	88,166,500	3.0	17,250,000	-	-	-	-	3	17,250,000	25.00	19.57	3	17,250,000	25	20	DISDA G

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSENT ASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	%				100	451,272,550	15.0	56,769,650	-	-	-	-	15	56,769,650	15.0	12.58	15	56,769,650	15	13	DISDA G
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan secara rutin/berkala	Bulan				12	35,572,000	-	5,612,000	-	-	-	-	-	5,612,000	-	15.78	-	5,612,000	-	16	DISDA G
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa perizinan dan sertifikasi	unit				30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	DISDA G
	Jumlah pemeliharaan alat angkutan darat secara rutin/berkala	unit				30	335,040,550	30.0	51,157,650	-	-	-	-	30	51,157,650	100.00	15.27	30	51,157,650	100	#DIV/0!	DISDA G
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan alat kantor secara rutin/berkala	unit				22	80,660,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISDA G

	Jumlah pemeliharaan komputer secara rutin/berkala	unit				19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	DISDA G	
Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan bangunan	Bulan				12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	DISDA G	
							Total rata-rata							5.6	4.7	4.7	2,174,89 3,953.0	1.7	4.7	
							Predikat Kinerja							Sangat Rendah						

Dari tabel. 2.1 untuk kinerja di triwulan I (pertama) Tahun 2021, belum bisa dihitung karena belum tuntasnya pelaksanaan kegiatan dan belum selesainya pelaporan kinerja dari bidang-bidang terkait. Sementara dari realisasi anggaran dapat kami laporkan bahwa realisasi masih dikisaran 11,8 % anggaran yang dialokasikan.

Dinas Perdagangan Kota Makassar dalam menyusun program kegiatan tahun 2020 mengacu pada RJPD Kota Makassar Tahun 2006-2025. Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 untuk urusan- urusan Dinas Perdagangan, dalam hal ini Urusan Pengendalian dan pengembangan perdagangan dan Perindustrian sudah tertuang dalam RENJA Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2020 sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Bappeda Kota Makassar terdapat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan
Kota Makassar Tahun 2020

NO	SASARAN		SATUAN	RENCANA	REALISASI	PERSENTASE	RATA-RATA	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		TINGKAT		PENCAPAIAN		
				CAPAIAN		TARGET		
1	Mejadikan pelaku usaha dan stekholder lainnya sebagai pengusaha yang profesional di bidangnya	1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Rp	31.391.560.000.000	23.777.629.400.000	75,74%	75,74
		2	Peningkatan usaha perdagangan	%	9		0%	0
		3	Peningkatan nilai perdagangan daerah	Rp	9.750.314.286.000	-7.976.231.650.000	-81,80%	-81,80 %
		4	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	87,36	0	0%	0
2	Menjadikan pasar, baik dalam, maupun luar negeri sebagai satu-satunya sarana yang mampu meningkatkan ekonomi pelaku usaha	1	Jumlah Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (SNI)	unit usaha	1	0	0%	0

		2	Jumlah produk ekspor unggulan	5	0	0	0%	0
3	Menjadikan konsumen yang tahu dan mengerti tentang hak-hak konsumen dan wajib pelaku usaha	2.	Cakupan pelayanan kemetrolagian	%	58	41,67	71,84%	71
4	Menciptakan pengawasan dan penindakan pelanggaran perdagangan dan pelanggaran perindustrian yang baik dan optimal.	1.	Cakupan penyelesaian sengketa konsumen	%	100	100	100%	100
		2.	Persentase Pelanggaran usaha perdagangan yang diselesaikan	%	100	0	0%	0
		3.	Persentase Pelanggaran usaha perindustrian yang diselesaikan	%	75	0	0%	0

		4.	Persentase Pelanggaran kemetrolgian yang diselesaikan	%	0	0	0%	0
5	Menjadikan industri sebagai salah satu basis utama dalam menunjang pembangunan regional yang berwawasan lingkungan	1	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB	%	12	18	0%	
		2	Persentase peningkatan omset Industri Kecil binaan	%	10	0	0%	
		3	Persentase peningkatan omset Industri Menengah	%	20	0	0%	
		4	Cakupan bina kelompok pengrajin	Kelompok	700	200	29%	
		5	Jumlah Industri kecil berbasis teknologi	IKM	50	75	150%	

		6	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	%	8,5	-4,22	-49,65%	
		7	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	%	15	0	0%	
		8	Proporsi nilai tambah industri manufaktur terhadap PDRB dan Perkapita	%	9	5,8	64%	

2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar yang berkaitan dengan pelayanan bidang perindustrian dan perdagangan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

A. Urusan Perdagangan

- a. Turunnya kinerja ekspor sebagai dampak dari pandemi;
- b. Harga kebutuhan barang pokok dan barang penting belum terjamin kestabilan harganya;
- c. Masih banyaknya jumlah masyarakat kurang mampu yang perlu diberikan bantuan berupa subsidi bahan kebutuhan pokok;
- d. Belum tersedianya data jumlah alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang digunakan dalam transaksi perdagangan;
- e. Adanya penerapan proteksionisme global sebagai strategi perdagangan berbagai negara sehingga sangat berdampak terhadap para pelaku usaha ekspor dan impor;
- f. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha ekspor sehingga sangat menyulitkan bersaing dengan pelaku usaha ekspor dan impor di negara lain;
- g. Negara kita masih bertumpu pada produk ekspor bahan mentah berbasis sumber daya alam dan bahan olahan dengan nilai tambah yang rendah;
- h. Masih rendahnya keterlibatan pelaku usaha kecil dan menengah dalam memanfaatkan FTA (Free Trade Agreement)/Perjanjian Perdagangan Bebas;
- i. Sistem pelayanan Perizinan yang Terintegrasi belum terbentuk;
- j. Belum tersedianya Data dan Informasi yang berkualitas;
- k. Belum tersedia ases pelporan bagi pelaku usaha secara elektronik;
- l. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap legalitas usaha di bidang perdagangan;
- m. Belum tersedianya sarana Pasar Rakyat yang bersertifikat SNI;
- n. Masih rendahnya Sumberdaya Manusia bagi Pengelola Pasar;
- o. Kualitas Produk Lokal yang belum memiliki Daya Saing;
- p. Masih kurangnya promosi produk unggulan daerah.

B. Urusan Perindustrian

- a. Kualitas Sumber daya manusia yang masih rendah;
- b. Jumlah sumber daya alam yang tersedia masih kurang;

- c. Infrastruktur sektor industri yang ada belum sesuai dengan kebutuhan;
- d. Regulasi Perencanaan dan Pembangunan Industri Kota Makassar yang belum tersedia;
- e. Sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan industri tidak sesuai dengan kebutuhan;
- f. Meningkatnya produk industri impor murah yang kurang bersaing dengan produk lokal.
- g. Terbatasnya akses permodalan bagi IKM;
- h. Belum maksimalnya penataan kawasan sentra industri.

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagaimana dibawah ini identifikasi isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal).

Tabel : 2.3. Identifikasi Isu -isu Strategis

Identifikasi Isu - isu Strategis (Lingkungan Eksternal)			
Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional	Lain-lain
Pemulihan Ekonomi Dunia Pasca Covid 19	Terselenggaranya event promosi dan pameran tingkat nasional sebagai ajang perkenalan produk unggulan	Fasilitasi promosi dan pameran pemanfaatan produk unggulan daerah	
Perluasan Pasar Non Tradisional	Tersedianya pelaku usaha yang handal dan berkualitas	Peningkatan kesejahteraan rakyat	
Diversifikasi Produk Ekspor	Terselenggaranya Pameran berbasis sumber daya baru dan terbarukan di tingkat nasional	Perluasan pasar domestic Fasililitasi pelaku usaha UMKM yang berpotensi ekspor	
	Tersedianya pelaku usaha UMKM yang berpotensi ekspor	Pembinaan yang berkelanjutan bagi peningkatan kualitas SDM	

<p>Perubahan Iklim</p> <p>Munculnya Raksasa Ekonomi Baru</p> <p>Pasar Bebas</p> <p>Persaingan global</p>		<p>pelaku usaha UMKM potensi ekspor</p> <p>Pemanfaatan tehnologi yang terbarukan</p> <p>Perbaikan infra struktur</p> <p>Peningkatan kemampuan teknologi</p> <p>Peningkatan nilai tambah produk industry</p> <p>Penerapan industri berwawasan lingkungan</p> <p>Pemanfaatan teknologi terbarukan</p> <p>Penciptaan lapangan kerja</p> <p>Pemberantasan produk ilegal penerapan SNI</p> <p>Memangkas birokrasi dalam beinvestasi dan menciptakan kondisi yang stabil serta kondusif</p>	
--	--	---	--

Dalam melanjutkan proses pembangunan di kota makassar, di mana pada masa ini sedang menghadapi masa transisi yang disebabkan oleh berakhirnya RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019 atau berakhirnya masa kerja Walikota Makassar periode 2014-2019, dan sementara penyusunan RPJMD 2021 – 2026 sehingga Rencana Kerja untuk Tahun 2022 akan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026, maka Dinas Perdagangan Kota Makassar telah menyiapkan (Enam) program utama berdasarkan permendagri 90, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN, diharapkan dapat memfasilitasi dan mengendalikan perizinan dan pendaftaran perusahaan serta

mengontrol penyelenggaraan usaha perdagangan di Kota Makassar atas aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar, sehingga diharapkan terciptanya ketertiban dalam bidang usaha perdagangan, baik dari sisi penempatan area pergudangan, usaha waralaba, peredaran minuman beralkohol serta tertib izin usaha perdagangan dalam Kota Makassar.

- b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN, diharapkan dapat melakukan peningkatan kualitas pasar tradisional dengan melakukan penilain pasar berstandar nasional Indonesia, juga menghadapi tantangan/hambatan berupa adanya perluasan pasar non tradisional, perluasan pasar domestik, perbaikan infrastruktur, dan lainnya.
- c. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING, diharapkan dapat mengantisipasi lonjakan harga di pasar-pasar tradisional dengan melakukan intervensi pasar dan melaksanakan kegiatan pasar murah bagi keluarga pra sejahtera.
- d. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR, diharapkan dapat meningkatkan nilai ekspor sehingga dapat memacu keterbukaan ekonomi daerah untuk mendorong investasi.
- e. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN diharapkan dapat mengantisipasi penyalahgunaan fungsi dari alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta memberikan jaminan aman dan nyaman atas konsumen Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kemetrolgian sehingga baik pelaku usaha maupun konsumen akan mengerti dan memahami hak dan kewajibannya. Selain itu program ini akan membantu mendongkrak pemasukan APBD Kota Makassar. Program pengawasan dan pengendalian pelanggaran perdagangan, perindustrian dan kemetrolgian, program ini diharapkan dapat mengawasi,
- f. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI diharapkan dengan program ini dapat meningkatkan kualitas produk daerah dan meningkatkan pembinaan terhadap Kelompok Pedagang/Usaha Informal.
- g. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI diharapkan dapat mengidentifikasi secara seksama tentang pertumbuhan ekonomi kreatif dari IKM

yang ada di Kota Makassar serta memberikan peningkatan kemampuan dan kapasitas kepada pelaku IKM sehingga mampu memasuki dunia usaha yang berbasis teknologi dan *online/internet*,

- h. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA diharapkan dapat melakukan pemantauan dan fasilitasi Izin usaha Industri Kecil dan Menengah.
- i. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL diharapkan dapat menyediakan informasi secara menyeluruh mengenai Industri kecil dan menengah di Kota Makassar.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting
		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	Kota Makassar	90	%	15.117.246.993	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Makassar	90	%		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	100	%		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Kota Makassar	90	%		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Kota Makassar	7	Dokumen	107.905.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kota Makassar	2	Dokumen	27.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	Kota Makassar	1	Dokumen	8.290.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	Kota Makassar	1	Dokumen	7.674.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	Kota Makassar	1	Dokumen	7.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	Kota Makassar	1	Dokumen	7.550.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIJP yang disusun	Kota Makassar	1	Dokumen	19.081.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi renja yang disusun	Kota Makassar	1	Dokumen	30.010.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan yang baik	Kota Makassar	416	Dokumen	12.458.247.293	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan pegawai ASN	Kota Makassar	12	Bulan	12.089.165.493	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Honorarium Pengelola Keuangan	Kota Makassar	12	Bulan	236.160.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi	Kota Makassar	4	Dokumen	4.281.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Kota Makassar	12	Dokumen	128.640.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen administrasi pengelolaan barang milik daerah yang baik	Kota Makassar	8	Dokumen	2.339.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang yang disusun	Kota Makassar	2	Dokumen	2.339.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyediaan administrasi kepegawaian	Kota Makassar	90	%	447.783.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	Kota Makassar	93	psg	247.089.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring dan penilaian kinerja yang dilakukan	Kota Makassar	12	bulan	50.694.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	Kota Makassar	2	orang	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	Kota Makassar	90	%	186.130.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Kota Makassar	9	jens	4.578.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32	Kota Makassar	12	Bulan	33.814.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kota Makassar	12	Bulan	23.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Makassar	12	Bulan	10.738.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan yang tersedia	Kota Makassar	7	jenis	24.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi keluar daerah yang dilaksanakan	Kota Makassar	8	kali	90.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana penunjang yang tersedia	Kota Makassar	90	%	303.017.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaran dinas jabatan yang di adakan	Kota Makassar	1	unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran operasional lapangan yang di adakan	Kota Makassar	1	unit mobil	82.091.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang di sediakan	Kota Makassar	2	Jenis	41.068.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Kota Makassar	3	Jenis	134.857.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana pendukung gedung kantor yang disediakan	Kota Makassar	1	unit	45.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kota Makassar	100	%	668.196.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa persuratan yang dilaksanakan	Kota Makassar	12	bulan	141.981.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Makassar	12	bulan	405.048.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	Kota Makassar	12	bulan	121.166.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Makassar	12	Bulan	943.628.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan secara rutin/berkala	Kota Makassar	12	Bulan	34.956.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Kota Makassar	30	unit	717.872.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	Kota Makassar	41	unit	40.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pemeliharaan aplikasi	Kota Makassar	1	unit	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Kota Makassar	1	unit	125.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan	Kota Makassar	45	%	382.341.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kota Makassar	340	izin	38.322.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan	Jumlah usaha yang diawasi dan dikendalikan	Kota Makassar	340	Unit	38.322.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah tada daftar gudang yang terbit	Kota Makassar	440	unit	165.304.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah gudang yang diawasi dan dikendalikan	Kota Makassar	440	Unit	165.304.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri yang terbit	Kota Makassar	460	Unit	60.886.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Usaha Waralaba yang diawasi dan dikendaliak	Kota Makassar	460	Unit	60.886.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat yang terbit	Kota Makassar	110	unit	117.828.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah usaha minuman beralkohol yang diawasi dan dikendalikan	Kota Makassar	110	Unit	117.828.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (Sni)	Kota Makassar	0	Pasar	41.774.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan masyarakat yang mendapat pembinaan	Kota Makassar	55,55	%		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	Kota Makassar			-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi berstandar SNI	Kota Makassar	0		-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	Kota Makassar	100	Orang	41.774.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	Kota Makassar	100	Orang	41.774.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Barang Kebutuhan Pokok Dengan Harga Stabil	Kota Makassar	33,3	%	1.539.520.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Persentase Barang Penting Dengan Harga Stabil	Kota Makassar	18	%		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah jenis bahan kebutuhan pokok yang terendali	Kota Makassar	11	Jenis	1.539.520.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pasar yang di pantau	Kota Makassar	10	pasar	57.760.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pasar murah yang dilaksanakan	Kota Makassar	15000	Paket	1.481.760.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan Nilai ekspor	Kota Makassar	402.937.200	\$	1.041.810.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi dagang yang dilaksanakan dan diikuti	Kota Makassar	5	Pameran	1.041.810.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Produk Ekspor Unggulan Kota Makassar yang di bina dan dikembangkan	Kota Makassar	200	Usaha	108.467.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran Dagang nasional yang diikuti	Kota Makassar dan nasional	2	pameran	229.713.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Pameran Dagang Lokal	Jumlah pameran dagang lokal yang dilaksanakan	Kota Makassar	2	pameran	144.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pameran Dagang Lokal yang dilaksanakan	Kota Makassar	1	pameran	115.963.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Citra Produk Ekspor yang ditingkatkan	Kota Makassar dan nasional	25	produk	243.079.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang di bina	Kota Makassar	20	usaha	200.488.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (Uttp) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	Kota Makassar	35	%	228.390.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	jumlah alat UTTP yang di tera	Kota Makassar	2000	UTTP	228.390.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat UTTP yang dilayani dikantor Jumlah alat UTTP yang dilayani di tempat pelaku usaha	Kota Makassar	2000	UTTP	145.284.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah alat UTTP yang di awasi	Kota Makassar	2000	UTTP	83.106.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	Kota Makassar	500	klp	507.809.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi, pemasaran produk dalam negeri yang dilaksanakan	Kota Makassar	1	pameran	507.809.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pameran Promosi Perdagangan	Kota Makassar	1	Pameran	168.201.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang dibina	Kota Makassar	500	klp	243.543.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah sistem jaringan informasi perdagangan yang di buat	Kota Makassar	1	buah	96.064.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Di Kota Makassar	Kota Makassar	1465	unit usaha	2.211.785.721	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-
	Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Perindustrian	Kota Makassar	250	orang		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Nilai Produksi IKM	Kota Makassar	105.160.097.700	Rp		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah perajin yang dibina	Kota Makassar	250	Orang	2.211.785.721	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Musyawarah Nasional yang diikuti Jumlah pameran Dekranasda yang diikuti	Kota Makassar dan nasional	4	pameran	546.887.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pameran industri kecil/menengah yang diikuti	Kota Makassar dan nasional	2	pameran	290.559.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Waktu operasional UPTD	Kota Makassar	12	bulan	600.609.721	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Perajin Daerah yang mengikuti pelatihan peningkatan Jumlah Perajin Home Industri yang dibina	Kota Makassar	250	Orang	773.730.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (Iui) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	Kota Makassar	50	%	399.863.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana
	Cakupan Binaan Kelompok Pengrajin	Kota Makassar	350	klp		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah usaha ikm yang di pantau	Kota Makassar	360	IKM	399.863.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah IKM yang mendapatkan edukasi	Kota Makassar	200	IKM	138.184.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah data IKM	Kota Makassar	360	IKM	261.679.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting
		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pesentase Ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini	Kota Makassar	100	%	58.332.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data informasi industri	Kota Makassar	100	%	58.332.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya data sinas bagi pelaku IKM	Kota Makassar	100	IKM	58.332.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

2. Analisa Kebutuhan Program dan kegiatan

				Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Bae Line Data	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
3	30,	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KO TA	Indek kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretari atan (Kepegawai an, Perlengkap an dan Keuangan)	90%	90	%	Kota Makassar	14.197.822.129	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KO TA	Indek kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretari atan (Kepegawai an, Perlengkap an dan Keuangan)	90	%	Kota Makas sar	15.995.647.202
	31	1			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90	%	Kota Makassar			90	%	Kota Makas sar		

						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100	%	Kota Makassar			Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100	%	Kota Makassar	
						Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas	90%	90	%	Kota Makassar			Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas	90	%	Kota Makassar	
3	30	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan, pengannaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	8	7	Dokumen	Kota Makassar	92.476.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan, pengannaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	7	Dokumen	Kota Makassar	427.530.000
3	30	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3	2	Dokumen	Kota Makassar	34.450.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2	Dokumen	Kota Makassar	253.100.000
3	30	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1	1	Dokumen	Kota Makassar	10.638.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1	Dokumen	Kota Makassar	8.800.000
3	30	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	1	1	Dokumen	Kota Makassar	10.160.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	1	Dokumen	Kota Makassar	9.480.000
3	30	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	1	1	Dokumen	Kota Makassar	8.455.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	Kota Makassar	8.200.000

3	30	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPA yang disusun	1	1	Dokumen	Kota Makassar	9.569.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPA yang disusun	1	Dokumen	Kota Makassar	7.550.000
3	30	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIJP yang disusun	1	1	Dokumen	Kota Makassar	10.303.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIJP yang disusun	1	Dokumen	Kota Makassar	9.400.000
3	30	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi renja yang disusun	1	1	Dokumen	Kota Makassar	8.901.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi renja yang disusun	1	Dokumen	Kota Makassar	131.000.000
3	30	0	2.	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan yang baik	216	416	Dokumen	Kota Makassar	12.596.570.779	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan yang baik	416	Dokumen	Kota Makassar	9.698.030.800
3	30	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan pegawai ASN	12	12	Bulan	Kota Makassar	12.119.168.979	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan pegawai ASN	12	Bulan	Kota Makassar	9.176.875.000
3	30	0	2.	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Honorarium Pengelola Keuangan	12	12	Bulan	Kota Makassar	346.080.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Honorarium Pengelola Keuangan	12	Bulan	Kota Makassar	395.880.000
3	30	0	2.	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi	4	4	Dokumen	Kota Makassar	3.681.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi	4	Dokumen	Kota Makassar	-
3	30	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12	12	Dokumen	Kota Makassar	127.640.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12	Dokumen	Kota Makassar	125.275.800

3	30	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen administrasi pengelolaan barang milik daerah yang baik	8	8	Dokumen	Kota Makassar	2.339.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen administrasi pengelolaan barang milik daerah yang baik	8	Dokumen	Kota Makassar	-
3	30	01	203	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang yang disusun	2	2	Dokumen	Kota Makassar	2.339.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang yang disusun	2	Dokumen	Kota Makassar	-
3	30	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyediaan administrasi kepegawaian	90%	90	%	Kota Makassar	279.644.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyediaan administrasi kepegawaian	90	%	Kota Makassar	245.595.600
3	30	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	74	93	psg	Kota Makassar	85.350.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	93	psg	Kota Makassar	85.350.000
3	30	01	205	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring dan penilaian kinerja yang dilakukan	12	12	bulan	Kota Makassar	54.294.600	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring dan penilaian kinerja yang dilakukan	12	bulan	Kota Makassar	50.245.600
3	30	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	0	2	orang	Kota Makassar	140.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	2	orang	Kota Makassar	110.000.000
3	30	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	90	90	%	Kota Makassar	187.209.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	90	%	Kota Makassar	236.277.000
3	30	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	9	9	jens	Kota Makassar	4.578.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	9	jens	Kota Makassar	4.578.000

3	30	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		32	12	12	Bulan	Kota Makassar	33.834.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		32	12	Bulan	Kota Makassar	75.643.000
3	30	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12	12	Bulan	Kota Makassar	23.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0	Bulan	Kota Makassar	-
3	30	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		12	12	Bulan	Kota Makassar	11.797.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		12	Bulan	Kota Makassar	11.056.000
3	30	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan yang tersedia		7	7	jenis	Kota Makassar	24.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan yang tersedia		7	jenis	Kota Makassar	24.000.000
3	30	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi keluar daerah yang dilaksanakan		8	8	kali	Kota Makassar	90.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi keluar daerah yang dilaksanakan		8	kali	Kota Makassar	121.000.000
3	30	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana penunjang yang tersedia		90%	90	%	Kota Makassar	117.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana penunjang yang tersedia		90	%	Kota Makassar	3.521.936.602
3	30	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaran dinas jabatan yang di adakan		1	1	unit	Kota Makassar	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaran dinas jabatan yang di adakan		1	unit	Kota Makassar	398.000.000
3	30	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran operasional lapangan yang di adakan		33	1	unit mobil	Kota Makassar	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran operasional lapangan yang di adakan		3	unit motor	Kota Makassar	-
3	30	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang di sediakan			2	Jenis	Kota Makassar	6.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang di sediakan		2	Jenis	Kota Makassar	-

3	30	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan		3	Jenis	Kota Makassar	111.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	4	Jenis	Kota Makassar	392.032.750
3	30	01	207	08	Pengadaan Aset Tak berwujud	Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi data perindustrian dan perdagangan				Kota Makassar	-	Pengadaan Aset Tak berwujud	Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi data perindustrian dan perdagangan	2	Unit	Kota Makassar	125.000.000
3	30	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana pendukung gedung kantor yang disediakan		1	unit	Kota Makassar	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana pendukung gedung kantor yang disediakan	1	Gedung	Kota Makassar	2.606.903.852
3	30	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100	%	Kota Makassar	405.881.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya pelayanan administrasi perkantoran	100	%	Kota Makassar	759.380.600
3	30	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa persuratan yang dilaksanakan	12	12	bulan	Kota Makassar	143.407.600	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa persuratan yang dilaksanakan	12	bulan	Kota Makassar	119.440.800
3	30	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	bulan	Kota Makassar	162.715.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	Kota Makassar	233.400.000
3	30	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	12	12	bulan	Kota Makassar	99.759.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	12	bulan	Kota Makassar	406.539.800

3	30	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana penunjang urusan pemerintah daerah	12	12	Bulan	Kota Makassar	516.200.950	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana penunjang urusan pemerintah daerah	12	Bulan	Kota Makassar	1.106.896.600
3	30	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan secara rutin/berkala	12	12	Bulan	Kota Makassar	34.956.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan secara rutin/berkala	12	Bulan	Kota Makassar	34.956.100
3	30	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	30	30	unit	Kota Makassar	400.584.850	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	30	unit	Kota Makassar	159.870.500
3	30	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	41	41	unit	Kota Makassar	80.660.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	41	unit	Kota Makassar	63.820.000
3	30	01	209	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pemeliharaan aplikasi	1	1	unit	Kota Makassar	-	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pemeliharaan aplikasi	1	unit	Kota Makassar	-
3	30	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1	1	unit	Kota Makassar	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	2	unit	Kota Makassar	848.250.000
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai	38,23 % (5077 dari 13.277 usaha)	45	%	Kota Makassar	383.221.400	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai	45	%	Kota Makassar	288.796.800

						Dengan Ketentuan							Dengan Ketentuan					
3	30	02	201		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		340	izin	Kota Makassar	38.757.000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	340	izin	Kota Makassar	15.452.000	
3	30	02	201	0	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah usaha yang diawasi dan dikendalikan		340	Unit	Kota Makassar	38.757.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah usaha yang diawasi dan dikendalikan	340	Unit	Kota Makassar	15.452.000	
3	30	02	202		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah tanda daftar gudang yang terbit		440	unit	Kota Makassar	165.509.800	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah tanda daftar gudang yang terbit	440	unit	Kota Makassar	133.991.800	
3	30	02	202	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah gudang yang diawasi dan dikendalikan		440	Unit	Kota Makassar	165.509.800	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah gudang yang diawasi dan dikendalikan	440	Unit	Kota Makassar	133.991.800	
3	30	02	203		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima		460	Unit	Kota Makassar	61.006.600	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima	460	Unit	Kota Makassar	13.610.000	

					Waralaba Dalam Negeri	Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri yang terbit					Waralaba Dalam Negeri	Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri yang terbit					
3	30	02	2.03	01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Usaha Waralaba yang diawasi dan dikendaliak	460	Unit	Kota Makassar	61.006.600	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Usaha Waralaba yang diawasi dan dikendaliak	460	Unit	Kota Makassar	13.610.000	
3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat yang terbit	110	unit	Kota Makassar	117.948.000	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat yang terbit	110	unit	Kota Makassar	125.743.000	
3	30	02	2.05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah usaha minuman beralkohol yang diawasi dan dikendalikan	110	Unit	Kota Makassar	117.948.000	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah usaha minuman beralkohol yang diawasi dan dikendalikan	110	Unit	Kota Makassar	125.743.000	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (Sni)	0	0	Pasar	Kota Makassar	41.774.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (Sni)	0	Pasar	Kota Makassar	10.290.101.248

					Persentase Sarana Distribusi Perdagangan an masyarakat yang mendapat pembinaan	0	55,55	%	Kota Makassar			Persentase Sarana Distribusi Perdagangan an masyarakat yang mendapat pembinaan	55,55	%	Kota Makassar		
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana distribusi perdagangan an dalam kondisi baik				Kota Makassar	-	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana distribusi perdagangan an dalam kondisi baik			Kota Makassar	10.290.101.248
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi berstandar SNI	0	0		Kota Makassar	-	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi berstandar SNI	2	unit	Kota Makassar	10.290.101.248
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan an yang di bina	0	100	Orang	Kota Makassar	41.774.000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan an yang di bina	100	Orang	Kota Makassar	-
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan an yang di bina	0	100	Orang	Kota Makassar	41.774.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan an yang di bina	0	Orang	Kota Makassar	-
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Barang Kebutuhan Pokok Dengan Harga Stabil	26%	33,3	%	Kota Makassar	254.155.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Barang Kebutuhan Pokok Dengan Harga Stabil	33,3	%	Kota Makassar	1.200.160.000

					Persentase Barang Penting Dengan Harga Stabil	16%	18	%	Kota Makassar		Persentase Barang Penting Dengan Harga Stabil	18	%	Kota Makassar			
3	30	0	2.		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah jenis bahan kebutuhan pokok yang terendali	11 jenis	11	Jenis	Kota Makassar	254.155.000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah jenis bahan kebutuhan pokok yang terendali	11	Jenis	Kota Makassar	1.200.160.000
3	30	0	2.	0	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pasar yang di pantau	10 pasar	10	pasar	Kota Makassar	254.155.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pasar yang di pantau	10	pasar	Kota Makassar	121.376.000
3	30	0	2.	0	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pasar murah yang dilaksanakan		15000	Paket	Kota Makassar	-	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pasar murah yang dilaksanakan	15	kali	Kota Makassar	1.078.784.000
3	30	0			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan Nilai ekspor	373.090.000 US\$	402.937.200	\$	Kota Makassar	697.926.200	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan Nilai ekspor	402.937.200	\$	Kota Makassar	506.020.400
3	30	0	2.		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1	Jumlah promosi dagang yang dilaksanakan dan diikuti		5	Pameran	Kota Makassar	697.926.200	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1	Jumlah promosi dagang yang dilaksanakan dan diikuti	5	Pameran	Kota Makassar	506.020.400

					(satu) Daerah Kabupaten/Kota							(satu) Daerah Kabupaten/Kota					
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Produk Ekspor Unggulan Kota Makassar yang di bina dan dikembangkan		50	Usaha	Kota Makassar	83.407.000	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Produk Ekspor Unggulan Kota Makassar yang di bina dan dikembangkan	10	jenis	Kota Makassar	87.060.000
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran Dagang nasional yang diikuti		2	pameran	Kota Makassar dan nasional	140.213.000	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran Dagang nasional yang diikuti	2	pameran	Kota Makassar dan nasional	129.213.000
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pameran dagang lokal yang dilaksanakan		2	pameran	Kota Makassar	76.963.000	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pameran dagang lokal yang dilaksanakan	2	pameran	Kota Makassar	76.963.000
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pameran Dagang Lokal yang dilaksanakan		1	pameran	Kota Makassar	99.963.000	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pameran Dagang Lokal yang dilaksanakan	1	pameran	Kota Makassar	-
3	30	05	2.01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Citra Produk Ekspor yang ditingkatkan		25	produk	Kota Makassar dan nasional	97.179.000	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Citra Produk Ekspor yang ditingkatkan	25	produk	Kota Makassar dan nasional	-
3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang di bina		20	usaha	Kota Makassar	200.201.200	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang di bina	20	usaha	Kota Makassar	212.784.400

3	30	0			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapan (Uttp) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	31,25 % (625 dari 2000 UTP)	35	%	Kota Makassar	7.200.000	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapan (Uttp) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	35	%	Kota Makassar	234.970.800
3	30	0	2.		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	jumlah alat UTP yang di tera		700	UTTP	Kota Makassar	228.276.800	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	jumlah alat UTP yang di tera	700	UTTP	Kota Makassar	234.970.800
3	30	0	2.	0	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat UTP yang dilayani dikantor Jumlah alat UTP yang dilayani di tempat pelaku usaha		700	UTTP	Kota Makassar	145.170.600	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat UTP yang dilayani dikantor Jumlah alat UTP yang dilayani di tempat pelaku usaha	700	UTTP	Kota Makassar	144.270.600
3	30	0	2.	0	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah alat UTP yang di awasi		700	UTTP	Kota Makassar	83.106.200	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah alat UTP yang di awasi	700	UTTP	Kota Makassar	90.700.200
3	30	0			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	400	500	klp	Kota Makassar	364.631.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	500	klp	Kota Makassar	530.880.000
3	30	0	2.		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi, pemasaran produk dalam negeri yang dilaksanakan		1	pameran	Kota Makassar	364.631.000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi, pemasaran produk dalam negeri yang dilaksanakan	1	pameran	Kota Makassar	530.880.000

3	30	07	201	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pameran Promosi Perdagangan	1	Pameran	Kota Makassar	103.514.000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pameran Promosi Perdagangan	1	Pameran	Kota Makassar	182.755.000	
3	30	07	201	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang dibina	400	500	klp	Kota Makassar	183.200.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang dibina	500	klp	Kota Makassar	227.008.000
3	30	07	201	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah sistem jaringan informasi perdagangan yang di buat		1	buah	Kota Makassar	77.917.000	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah sistem jaringan informasi perdagangan yang di buat	3	Unit	Kota Makassar	121.117.000
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Di Kota Makassar	1215 data hasil monev	1465	unit usaha	Kota Makassar	11.250.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Di Kota Makassar	1465	unit usaha	Kota Makassar	2.446.296.750
						Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Perindustrian	0	250	orang	Kota Makassar			Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Perindustrian	250	orang	Kota Makassar	
										Kota Makassar			##### ###	Rp	Kota Makassar		
3	31	02	201		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah perajin yang dibina		250	Orang	Kota Makassar	2.066.323.471	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah perajin yang dibina	350	Orang	Kota Makassar	2.446.296.750

3	31	02	201	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Musyawarah Nasional yang diikuti Jumlah pameran Dekranasda yang diikuti	12	4	pameran	Kota Makassar dan nasional	546.887.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Musyawarah Nasional yang diikuti Jumlah pameran Dekranasda yang diikuti	4	pameran	Kota Makassar dan nasional	546.887.000
3	31	02	201	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pameran industri kecil/menengah yang diikuti	3	2	pameran	Kota Makassar dan nasional	290.559.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pameran industri kecil/menengah yang diikuti	2	pameran	Kota Makassar dan nasional	145.720.000
3	31	02	201	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Waktu operasional UPTD	12	12	bulan	Kota Makassar	545.016.471	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Waktu operasional UPTD	12	bulan	Kota Makassar	573.657.750
3	31	02	201	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Perajin Daerah yang mengikuti pelatihan peningkatan Jumlah Perajin Home Industri yang dibina		250	Orang	Kota Makassar	683.861.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Perajin Daerah yang mengikuti pelatihan peningkatan Jumlah Perajin Home Industri yang dibina	350	Orang	Kota Makassar	1.180.032.000

3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (Iui) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	(65 izin yang keluar dari 106 pemohon)	50	%	Kota Makassar	353.870.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (Iui) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	50	%	Kota Makassar	322.791.600
						Cakupan Binaan Kelompok Pengrajin	300	350	klp	Kota Makassar			Cakupan Binaan Kelompok Pengrajin	350	klp	Kota Makassar	
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah usaha ikm yang di pantau		360	IKM	Kota Makassar	353.870.000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah usaha ikm yang di pantau	360	IKM	Kota Makassar	322.791.600
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi	Jumlah IKM yang mendapatkan edukasi		360	IKM	Kota Makassar	121.452.400	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Jumlah data IKM	200	IKM	Kota Makassar	69.534.000

					Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)							Kewenangan Kabupaten/ Kota					
3	31	03	201	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah data IKM		360	IKM	Kota Makassar	232.417.600	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah data IKM	360	IKM	Kota Makassar	253.257.600
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pesentase Ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini	0	100	%	Kota Makassar	-	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pesentase Ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini	100	%	Kota Makassar	219.984.000
3	31	04	201		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tersedianya data informasi industri		100	%	Kota Makassar	-	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tersedianya data informasi industri	100	%	Kota Makassar	219.984.000

3	31	04	201	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya data sinas bagi pelaku IKM		100	IKM	Kota Makassar	-	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya data sinas bagi pelaku IKM	100	IKM	Kota Makassar	219.984.000
3	31	04	201	03	Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian Data ke SIINas	Terpenuhi data kepatuhan perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian Data ke SIINas	Kota Makassar			-		Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian Data ke SIINas	Terpenuhi data kepatuhan perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian Data ke SIINas			Kota Makassar	-
																	32.035.648.800

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Kota Makassar Tahun 2022. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kota Makassar Tahun 2022 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD Kota Makassar Tahun 2022.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Kota Makassar Tahun 2022 yang meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan, dapat diuraikan bahwa usulan program dan kegiatan dalam Renja tidak ada perbedaan dengan rancangan awal RKPD Kota Makassar Tahun 2022. Ada beberapa program dan kegiatan yang pada target RPJM dan RENSTRA SKPD baru di anggarkan pada tahun 2023 yaitu pembangunan pasar berdasarkan hasil analisa dan kebijakan Walikota Makassar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi maka target pembangunan atauy Revitalisasi pasar dimajukan di tahun 2022.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahunan yang sedang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Makassar. Usulan program dan kegiatan ini berasal dari usulan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) yang diadakan pada awal tahun 2021, dimulai dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan sampai dengan tingkat Kota Makassar. Usulan program dan kegiatan tersebut di inventarisasi yang memiliki kesesuaian dengan tugas pokok

dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Makassar kemudian dipilah lagi berdasarkan prioritas, fokus kebijakan tahun 2022, indikator kinerja yang ingin dicapai dan implikasi terhadap capaian renstra OPD maupun terhadap RPJMD Kota Makassar. Secara lengkap usulan program dan kegiatan dari masyarakat untuk Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

No	Usulan					
	Pekerjaan	Sifat	Lokasi Detail	Volume Usulan	Pagu Usulan (Rp)	Keterangan
	Nihil	nihil	Nihil	Nihil	nihil	nihil
TOTAL (Rp)						

No	Usulan Kecamatan						
	Kegiatan	Pengusul	Sifat	Lokasi Detail	Volume Usulan	Pagu Usulan (Rp)	Keterangan
1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	ADI RASYID ALI, SE, MM	Baru	Jl. Kirab Remaja Rw.01/Rt.07, Kota Makassar, Manggala, Antang	1 kelompok	-	
TOTAL (Rp)						-	

Berdasarkan hasil Musrembang tingkat kelurahan, kecamatan dan kota, jumlah usulan program/kegiatan yang berasal dari masyarakat atau pemangku kepentingan adalah sebanyak 1 (satu) usulan kegiatan. Secara umum program/kegiatan masyarakat tersebut telah diakomodir dalam program/kegiatan Dinas perdagangan dalam dokumen Renja Tahun 2022 ini, karena berkaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Makassar adapun lokasi pelaksanaan akan ditentukan kemudian.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024, arah kebijakan perindustrian dan perdagangan mencakup beberapa sasaran strategis seperti yang terdapat dalam tabel 3.1 berikut:

Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
<ul style="list-style-type: none">- Kebijakan pengembangan sumber daya industri<ul style="list-style-type: none">o Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan sasaran meningkatkan tenaga kerja industri yang kompeten.o Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan 3 (tiga) sasaran yaitu:<ul style="list-style-type: none">▪ 1) Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas;▪ 2) Penguatan implementasi <i>making indonesia 4.0</i>; dan▪ 3) Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri.- Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri<ul style="list-style-type: none">o Pengembangan standardisasi industri.o Pengembangan infrastruktur industri.o Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).- Kebijakan Pemberdayaan industri.<ul style="list-style-type: none">o Pengembangan industri kecil dan menengaho Pengembangan industri hijau.o Pengembangan industri strategiso Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).	Renstra Kementrian Perindustrian 2020- 2024	

<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Stabilitas Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan - Pembinaan Usaha dan Pelaku Distribusi Perdagangan - Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri - Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah - Standardisasi dan Pengendalian Mutu Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa - Peningkatan Tertib Ukur Peningkatan Pelayanan Kalibrasi - Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas - Pengelolaan fasilitasi ekspor dan impor 	<p>Renstra Kementerian Perdagangan 2020- 2024</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Volume Dan Nilai Ekspor Serta Terkendalinya Barang Impo - Meningkatnyapangsa pasardalam negeri,efisiensi danefektivitasistemdistribusidaerah, sertawirausaha baru sektorperdagangan - Terciptanya Perlindungan Konsumen Dan Kepastian Hukum Produsen Serta Keamanan Barang Bereda 	<p>Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Sul-Sel 2018-2023</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kemampuan teknologi dan inovasi industri - Tumbuh dan berkembangnya Sentra industri dan kawasan industri - Meningkatnya kapasitas Tumbuh dan berkembangnya industri besar, Kecil dan Menengah di kabupaten/kota serta hilirisasi sektor perindustrian teknologi, SDM dan sistem produksi 	<p>Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sul-Sel 2018-2023</p>	

Kebijakan nasional yang termuat dalam RKP dan provinsi akan didukung dengan sasaran dan program pada RPJMD Kota Makassar dan Renstra Dinas Perdagangan Kota Makassar. Adapun sasaran dan program dari Dinas Perdagangan Kota Makassar dalam lingkup program utama yaitu:

1. Meningkatnya Kompetensi angkatan kerja dan pemuda, pada sasaran ini mencakup Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
2. Tersedianya kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru, Sasaran ini mencakup Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan. Program ini seraha dengan kebijakan Nasional Pengembangan Industri kecil dan Menengah dan seraha dengan kebijakan Provinsi yaitu Meningkatnya kapasitas Tumbuh dan berkembangnya industri besar, Kecil dan Menengah di kabupaten/kota serta hilirisasi sektor perindustrian teknologi, SDM dan sistem produksi.
3. Terwujudnya gerakan masyarakat memperkuat ketahanan ekonomi dan industri kreatif mencakup Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Makassar

Adapun Tujuan dan Sasaran RPJM 2021-2026 yakni:

No.	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatnya Kompetensi angkatan kerja dan pemuda.
2.	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Realisasi Investasi	Tersedianya kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru

	Terwujudnya gerakan masyarakat memperkuat ketahanan ekonomi dan industri kreatif
--	--

Adapun tujuan Dan Sasaran Dinas perdagangan berdasarkan RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TASHUN KE -				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia		Cakupan bina kelompok usaha industri dan perdagangan	27,27 %	27,27 %	27,27 %	27,27 %	27,27 %
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Persentase Jumlah kelompok Usaha Informal yang dibina	12,5 %	12,5 %	12,5 %	12,5 %	12,5 %
		Cakupan bina kelompok Pengrajin	27,70 %	28,30 %	28,90 %	29,40 %	30 %
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah Melalui Sektor Perdagangan		Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	20,46	21,86	22,86	23,86	24%
	Meningkatnya Usaha Perdagangan	Pertumbuhan Usaha Perdagangan	3,76 %	3,76 %	3,76 %	3,76 %	3,76 %
	Meningkatkan Kinerja Ekspor	Nilai bersih Ekspor	- 450.000.000 \$	- 350.000.000 \$	- 250.000.000 \$	- 150.000.000 \$	- 50.000.000 \$
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Akuntabilitas Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	52,69	55,7	56,9	57,3	58,0
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah Melalui Sektor industri pengolahan yang berkualitas		Kontribusi PDRB Sektor Industri	18,34 %	19,12 %	19,9 %	20,68 %	21,46 %
	Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil dan menengah	Pertumbuhan Industri kecil dan menengah	10,14 %	11,28 %	12,72%	15,16 %	16,49 %

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2022 mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Rancangan Awal RKPD Kota Makassar Tahun 2022, Rancangan Awal RPJMD Kota Makassar 2021-2026 dan Rancangan Awal RPJPD Sulawesi Selatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan Tahun 2021.

Penyusunan program dan kegiatan tahun 2022 juga memperhatikan pembagian tupoksi antar bidang pada Dinas Perdagangan Kota Makassar berdasarkan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar dan Peraturan Walikota No. 55 Tahun 2020.

Panduan pelaksanaan RENJA Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2022 berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dimana tahun 2022 merupakan masa awal penyusunan RPJMD periode 2021-2026.

Adapun program utama dan Program pendukung berdasarkan kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Makassar yang berkaitan dengan bidang perdagangan dan perindustrian adalah sebagai berikut :

A. Program Utama

1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
A	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
B	Penerbitan Tanda Daftar Gudang
1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
C	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
1	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik
D	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
1	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
A	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
B	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
A	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
A	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
2	Pameran Dagang Nasional
3	Pameran Dagang Lokal
4	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
5	Peningkatan Citra Produk Ekspor
6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
A	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
6	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
A	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
A	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
8	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
A	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota
9	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
A	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

B. Program Pendukung

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3	Pengadaan Mebel
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6	Pengadaan Aset Tak berwujud
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan dari suatu perangkat daerah dalam bentuk aksi yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen dari arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) dari suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kota Makassar Tahun 2022 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk menyusun program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksanaan dari program dan kegiatan perangkat tahun 2022 dan Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Makassar dalam hal ini Dinas Perdagangan.

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3 30, 31 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	Kota Makassar	90 %	15.995.647.202	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90 %	15.680.129.342	
		Persentase sarana dan prasarana	Kota Makassar	90 %		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90 %		

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		aparatur dalam kondisi baik									
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	100	%		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	%	
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan	Kota Makassar	90	%		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90	%	

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						tan kapasitas									
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Kota Makassar	7	Dokumen	427.530.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7	Dokumen	101.723.600
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Kota Makassar	2	Dokumen	253.100.000	PENDAPATAN ASLI		2	Dokumen	37.895.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)						
		aan yang disusun				DAERAH (PAD)									
3	30	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	Kota Makassar	1	Dokumen	8.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	11.701.800
3	30	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	Kota Makassar	1	Dokumen	9.480.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	11.176.000
3	30	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	Kota Makassar	1	Dokumen	8.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Dokumen	9.300.500

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3 30 0 2. 0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	Kota Makassar	1 Dokumen	7.550.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	Dokumen	10.525.900
3 30 0 2. 0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKlJP yang disusun	Kota Makassar	1 Dokumen	9.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	Dokumen	11.333.300
3 30 0 2. 0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi renja yang disusun	Kota Makassar	1 Dokumen	131.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	Dokumen	9.791.100
3 30 0 2. 0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan	Kota Makassar	416 Dokumen	9.698.030.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	426	Dokumen	13.856.227.857

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)						
		n yang baik													
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedian ya gaji dan tunjangan pegawai ASN	Kota Makassar	12	Bulan	9.176.875.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU		12	Bulan	13.331.085.877
3	30	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Honorarium Pengelola Keuangan	Kota Makassar	12	Bulan	395.880.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		410	Dokumen	380.688.000
3	30	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi	Kota Makassar	4	Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4	Dokumen	4.049.100

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3	30	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Kota Makassar	12	Dokumen	125.275.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12	Dokumen	140.404.880
3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Peringkat Daerah	Tersedianya Dokumen administrasi pengelolaan barang milik daerah yang baik	Kota Makassar	8	Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8	Dokumen	2.572.900
3	30	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan	Kota Makassar	2	Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2	Dokumen	2.572.900

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						n barang yang disusun									
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyediaan administrasi kepegawaian	Kota Makassar	90	%	245.595.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90	%	307.609.060
3	30	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	Kota Makassar	93	psg	85.350.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		93	psg	93.885.000
3	30	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring dan penilaian kinerja yang dilakukan	Kota Makassar	12	bulan	50.245.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12	bulan	59.724.060

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
3	30	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	Kota Makassar	2	orang	110.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2	orang	154.000.000
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	Kota Makassar	90	%	236.277.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90	%	180.629.900
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Kota Makassar	9	jens	4.578.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9	jens	5.035.800
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan	Kota Makassar	12	Bulan	75.643.000	PENDAPATAN ASLI	12	Bulan	37.217.400

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						perlengkapan kantor					DAERAH (PAD)				
3	30	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya bahan peralatan rumah tangga	Kota Makassar	0	Bulan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12	Bulan	-
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Makassar	12	Bulan	11.056.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12	Bulan	12.976.700
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan yang tersedia	Kota Makassar	7	jenis	24.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7	jenis	26.400.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3 30 01 00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi keluar daerah yang dilaksanakan	Kota Makassar	8 kali	121.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9 kali	99.000.000	
3 30 01 00 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana penunjang yang tersedia	Kota Makassar	90 %	3.521.936.602	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90 %	217.075.000	
3 30 01 00 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan	Kota Makassar	1 unit	398.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 unit	-	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)					
3 30 0 2. 0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional lapangan yang diadakan	Kota Makassar	3 unit motor	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	-				
3 30 0 2. 0	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	Kota Makassar	2 Jenis	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Jenis	-				
3 30 0 2. 0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Kota Makassar	4 Jenis	392.032.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Jenis	117.075.000				
3 30 0 2. 0	Pengadaan Aset Tak berwujud	Tersedianya Aplikasi Sistem	Kota Makassar	2 Unit	125.000.000	PENDAPATAN ASLI		Unit					

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)					
		Informasi data perindustrian dan perdagangan				DAERAH (PAD)								
3	30	01	2.07	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana pendukung gedung kantor yang disediakan	Kota Makassar	1	Gedung	2.606.903.852	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	unit	100.000.000
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kota Makassar	100	%	759.380.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100	%	446.469.980

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3 30 0 2. 0 1 0 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa persuratan yang dilaksanakan	Kota Makassar	12 bulan	119.440.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 bulan	157.748.360	
3 30 0 2. 0 1 0 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Makassar	12 bulan	233.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 bulan	178.986.720	
3 30 0 2. 0 1 0 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	Kota Makassar	12 bulan	406.539.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 bulan	109.734.900	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3 30 0 2. 0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Makassar	12 Bulan	1.106.896.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Bulan	567.821.045	
3 30 0 2. 0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan secara rutin/berkala	Kota Makassar	12 Bulan	34.956.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Bulan	38.451.710	
3 30 0 2. 0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Kota Makassar	30 unit	159.870.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 unit	440.643.335	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3 30 0 2. 0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	Kota Makassar	41 unit	63.820.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	45 unit	88.726.000	
3 30 0 2. 0	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pemeliharaan aplikasi	Kota Makassar	1 unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 unit	-	
3 30 0 2. 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Kota Makassar	2 unit	848.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 unit	-	
3 30 0 2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin	Kota Makassar	45 %	288.796.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 %	421.543.540	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)						
3	30	02	2.01												
					Sesuai Dengan Ketentuan										
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kota Makassar	340	izin	15.452.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		340	izin	42.632.700
3	30	02	2.01	0	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah usaha yang diawasi dan	Kota Makassar	340	Unit	15.452.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		340	Unit	42.632.700

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
					Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dikendalikan								
3	30	0202			Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah tanda daftar gudang yang terbit	Kota Makassar	440 unit	133.991.800	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		440 unit	182.060.780	
3	30	0202	01		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah gudang yang diawasi dan dikendalikan	Kota Makassar	440 Unit	133.991.800	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		440 Unit	182.060.780	
3	30	0203			Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran	Kota Makassar	460 Unit	13.610.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		460 Unit	67.107.260	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)				
		Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri yang terbit											
3	30	0203	2.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Usaha Waralaba yang diawasi dan dikendalikan	Kota Makassar	460	Unit	13.610.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	460	Unit	67.107.260
3	30	0205		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan	Kota Makassar	110	unit	125.743.000	PENDA PATAN ASLI	110	unit	129.742.800

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)				
	Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	gan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat yang terbit				DAERAH (PAD)							
3	30	02	2.05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah usaha minuman beralkohol yang diawasi dan	Kota Makassar	110 Unit	125.743.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		110 Unit	129.742.800

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
		dikendalikan										
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (Sni)	Kota Makassar	0	Pasar	10.290.101.248	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1	Pasar	8.765.951.400
				Persentase Sarana Distribusi Perdagangan masyarakat yang mendapat	Kota Makassar	55,55	%		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	83,33	%	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)				
		pembinaan													
3	30	03	2.01												
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	Kota Makassar			10.290.101.248	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	pasar	8.720.000.000		
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi berstandar SNI	Kota Makassar	2	unit	10.290.101.248	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Pasar	8.720.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)				
3 30 0 2.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang di bina	Kota Makassar	100	Orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Orang	45.951.400		
3 30 0 2.	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang di bina	Kota Makassar	0	Orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100	Orang	45.951.400		
3 30 0 4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Barang Kebutuhan Pokok Dengan Harga Stabil	Kota Makassar	33,3	%	1.200.160.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		33,3	%	279.570.500		

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)				
		Persentase Barang Penting Dengan Harga Stabil	Kota Makassar	18	%		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18	%				
3	30	0	2.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah jenis bahan kebutuhan pokok yang terendali	Kota Makassar	11	Jenis	1.200.160.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11	Jenis	279.570.500
3	30	0	2.	0	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pasar yang di pantau	Kota Makassar	10	pasar	121.376.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10	pasar	279.570.500

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pasar murah yang dilaksanakan	Kota Makassar	15	kali	1.078.784.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15	kali	-
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan Nilai ekspor	Kota Makassar	402.937.200	\$	506.020.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	463.377.780	\$	767.718.820
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi dagang yang dilaksanakan dan diikuti	Kota Makassar	5	Pameran	506.020.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5	Pameran	767.718.820
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Produk Ekspor Unggulan	Kota Makassar	10	jenis	87.060.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10	Jenis	91.747.700

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						Kota Makassar yang di bina dan dikembangkan									
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran Dagang nasional yang diikuti	Kota Makassar dan nasional	2	pameran	129.213.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		2	pameran	154.234.300
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pameran dagang lokal yang dilaksanakan	Kota Makassar	2	pameran	76.963.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		2	pameran	84.659.300
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pameran Dagang Lokal yang	Kota Makassar	1	pameran	-	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	pameran	109.959.300

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						dilaksanakan									
3	30	05	2.01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Citra Produk Ekspor yang ditingkatkan	Kota Makassar dan nasional	25	produk	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25	produk	106.896.900
3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibangun	Kota Makassar	20	usaha	212.784.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20	usaha	220.221.320
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takaran, Timbang	Kota Makassar	35	%	234.970.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45	%	251.104.480

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)					
		an Dan Perlengkapannya (Uttp) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku												
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	jumlah alat UTP yang di tera	Kota Makassar	700	UTTP	234.970.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	900	UTTP	251.104.480
3	30	06	2.01	0	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat UTP yang dilayani dikantor Jumlah alat UTP yang dilayani di tempat	Kota Makassar	700	UTTP	144.270.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	900	UTTP	159.687.660

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						pelaku usaha									
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah alat UTTP yang diawasi	Kota Makassar	700	UTTP	90.700.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		900	UTTP	91.416.820
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	Kota Makassar	500	klp	530.880.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500	klp	388.038.250
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi, pemasaran produk dalam negeri	Kota Makassar	1	pameran	530.880.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	pameran	388.038.250

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)						
		yang dilaksanakan													
3	30	07	2.01	0	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pameran Promosi Perdagangan	Kota Makassar	1	Pameran	182.755.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	Pameran	113.865.400
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pedagang /usaha informal yang dibina	Kota Makassar	500	klp	227.008.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500	klp	192.360.000
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah sistem jaringan informasi perdagangan	Kota Makassar	3	Unit	121.117.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	buah	81.812.850

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)					
		gan yang di buat												
3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Di Kota Makassar	Kota Makassar	1465	unit usaha	2.446.296.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1825	unit usaha	2.196.890.468
					Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Perindustrian	Kota Makassar	250	orang		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250	orang	

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						Nilai Produksi IKM	Kota Makassar	105.160.097.700	Rp		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		110.418.102.585	Rp	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah perajin yang dibina	Kota Makassar	350	Orang	2.446.296.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350	Orang	2.196.890.468
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Musyawarah Nasional yang diikuti Jumlah pameran Dekranasda yang diikuti	Kota Makassar dan nasional	4	pameran	546.887.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4	pameran	574.231.350

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
3	31	02	201	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pameran industri kecil/mengah yang diikuti	Kota Makassar dan nasional	2	pameran	145.720.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2	pameran	305.086.950
3	31	02	201	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Waktu operasional UPTD	Kota Makassar	12	bulan	573.657.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	bulan	599.518.118
3	31	02	201	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Perajin Daerah yang mengikuti pelatihan peningkatan Jumlah Perajin Home	Kota Makassar	350	Orang	1.180.032.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	350	Orang	718.054.050

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
						Industri yang dibina								
3	31	0	3		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (lui) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluark	Kota Makassar	50	%	322.791.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75	%	371.563.500

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
		an Oleh Instansi Terkait										
		Cakupan Binaan Kelompok Pengrajin	Kota Makassar	350 klp		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	350 klp					
3	31	0	2.		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah usaha ikm yang di pantau	Kota Makassar	360 IKM	322.791.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	360 IKM	371.563.500

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah IKM yang mendapatkan edukasi	Kota Makassar	200	IKM	69.534.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200	IKM	127.525.020
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah data IKM	Kota Makassar	360	IKM	253.257.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		360	IKM	244.038.480
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pesentase Ketersediaan	Kota Makassar	100	%	219.984.000	PENDAPATAN ASLI		100	%	155.379.400

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)					
		Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini						DAERAH (PAD)						
3	31	0	2.		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data informasi industri	Kota Makassar	100	%	219.984.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100	%	155.379.400
3	31	0	2.	0	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya data sinas bagi pelaku IKM	Kota Makassar	100	IKM	219.984.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100	IKM	58.300.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3 31 0 4 2. 0 1 0 3	Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian Data ke SIINas	Terpenuhinya data kepatuhan perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian Data ke SIINas	Kota Makassar		-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200	IKM	97.079.400
Jumlah Total					32.035.648.800				29.277.889.700

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja yang disusun oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar tahun 2022 yang memuat program-program dan kegiatan adalah dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan sama kegiatan yang mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antara kegiatan, baik antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antara program, antara seksi dan seksi lain pada Dinas Perdagangan Kota Makassar dan instansi yang terkait lainnya, dengan tetap memperhatikan peran tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD Kota Makassar sesuai dengan ketentuan dan persamaan perundang-undangan yang berlaku .

Program dan kegiatan serta pendanaan indikatif yang tercantum dalam dokumen rencana kerja tahun 2022 akan di biyai oleh sumber pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar dan Dana Alokasi Kusus, oleh karena itu komitmen pimpinan dan segenap Staf Dinas Perdagangan Kota Makassar dalam merealisasikan semua program dan kegiatan harus di dukung oleh semua Stake Holder serta dukungan partisipasi masyarakat sangat di butuhkan .

Kami sadari semuanya bahwa dalam penyusunan kerja ini, baik proses maupun hasilnya masih jauh dari sempurna tentang program dan kegiatan.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2022. Diharapkan dapat di analisa dan di realisasikan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2022 yang akan datang. Amiin.

Makassar, November 2021
Plt. Kepala Dinas Perdagangan
Kota Makassar

ARLIN ARIESTA S.STP,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19770411 199511 1 002